JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

RUU Perampasan Aset dalam Perspektif Kejaksaan

Jaminan hak kebendaan, pencegahan kesewenang-wenangan, lembaga pengelola aset, dan pembedaan jalur perampasan

Rapat dengan Komisi III DPR RI · November 2026





PENDAHULUAN

Mendukung RUU, dalam empat aspek

1 · UUD 1945	Jaminan Undang-Undang Dasar 1945 atas hak kebendaan
2 · NON-ARBITRARY	Pencegahan penyalahgunaan kewenangan (non-arbitrary forfeiture)
3 · LEMBAGA	Lembaga pengelola aset terintegrasi dengan sistem peradilan, sesuai praktik internasional
4 · JALUR	Pembedaan jalur conviction based dan non-conviction based; RUU ini komplementer KUHAP

Baik in rem maupun in personam memerlukan putusan pidana (conviction based). Perampasan tanpa putusan pidana (non-conviction based/NCB) tidak dipakai semua negara, dan badan baru yang independen tidak selalu lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

NCB perlu diikuti dengan seksama: sejalan dengan due process of law, perlindungan hak kebendaan, keseimbangan beracara, dan diakui praktik internasional.

1 · TITIK TOLAK: UUD 1945

Hak milik dilindungi konstitusi

Pasal 28H ayat (4)

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”

Tidak boleh sewenang-wenang

Pasal 28G ayat (1)

“Setiap orang berhak atas perlindungan … harta benda yang di bawah kekuasaannya …”

Negara wajib melindungi harta benda

Pasal 28J ayat (2)

“… setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang …”

Pembatasan hanya dengan undang-undang

ARTINYA Ketiganya dibaca satu kesatuan. Perampasan tanpa putusan pidana hanya sah bila diatur tegas dalam undang-undang, ditetapkan putusan hakim, dan proporsional: sebatas aset yang terbukti terkait tindak pidana.

Sejalan dengan Putusan MK 172/PUU-XXIII/2025 (16 Maret 2026): kewenangan perampasan harus memenuhi “legitimasi, proporsionalitas dan kepastian hukum”

1 · ILLICIT ENRICHMENT, BUKAN UNEXPLAINED WEALTH

Illicit enrichment, bukan unexplained wealth

ILLICIT ENRICHMENT · UNCAC DAN UNTOC

Memperkaya diri sendiri secara tidak sah. Pendekatan inilah yang dipakai UNCAC (Ps. 20) dan UNTOC.

UNEXPLAINED WEALTH · DRAF PS. 5 AYAT (2) DAN (3)

Aset yang tidak dapat dijelaskan asal usulnya dianggap hasil kejahatan. Tidak dipakai UNCAC maupun UNTOC, dan sangat rentan disalahgunakan.

PRINSIP YANG KAMI USULKAN

1. Unexplained wealth bukan teknik pembuktian; draf Ps. 5 ayat (2) dan (3) disesuaikan dengan pendekatan illicit enrichment
2. JPN membuktikan dua hal: tindak pidana terjadi, dan aset betul berasal dari tindak pidana itu (draf Ps. 39 ayat (1))
3. Harta tak seimbang hanya petunjuk awal (Direktif UE 2024/1260 Ps. 16); pembalikan beban pembuktian hanya di sidang pidana (UU TPPU Ps. 77–78; UU Tipikor Ps. 37A, 38B)

Sumber: UNCAC Ps. 20 · UNTOC · Directive (EU) 2024/1260 Ps. 16 · PJC Law Enforcement, Unexplained Wealth (2012) · UU 8/2010 · UU 31/1999 jo. UU 20/2001

2 · NON-ARBITRARY FORFEITURE

NCB pernah ditinggalkan dan dikoreksi karena abusif

DITINGGALKAN ATAU DITOLAK

Inggris

NCB dipakai sejak abad pertengahan untuk perkara pengkhianatan terhadap Raja (treason); dihentikan melalui Forfeiture Act 1870 karena sangat sewenang-wenang.

Belanda

Menolak NCB karena rawan kesewenang-wenangan; memakai penyidikan finansial oleh jaksa, paralel dengan penyidikan biasa, dalam kerangka pidana.

DIKOREKSI KARENA ABUSIF

AS

Dipakai atas aset Kartel Medellin (1990-an), lalu disalahgunakan penyidik Miami untuk memeras. Kini harus lewat jaksa yang meminta prima facie ke pengadilan.

Australia

Dipicu kasus geng motor berharta tak berimbang, lalu jadi ajang pemerasan penyidik. Kini NCB komplementer perkara pidana, misalnya atas aset baru yang ditemukan saat sidang.

PILIHAN

Dari ketiga percontohan (AS, Australia, Belanda), Indonesia perlu memilih yang paling sesuai. Benang merahnya: NCB yang dijalankan langsung oleh penyidik menjadi abusif.

Ringkasan pengalaman negara pembanding sebagaimana diuraikan dalam Pandangan Kejaksaan RI, November 2026

2 · PERAN PENGADILAN

Pengadilan mencegah kesewenang-wenangan

INGGRIS · NCA v BAKER (2020)

3 UWO

Tiga unexplained wealth order (UWO) atas properti ±£80 juta diberikan tanpa mendengar pemiliknya; dibatalkan setelah pemilik hadir di persidangan.

AUSTRALIA · NEW SOUTH WALES

2009

High Court membatalkan ketentuan yang membolehkan pengadilan memeriksa permohonan pembekuan aset tanpa mendengar pemiliknya.

ARTINYA Putusan pengadilan berposisi penting mencegah kesewenang-wenangan: pemilik harus didengar sebelum asetnya dibekukan atau dirampas.

Sumber: NCA v Baker [2020] EWHC 822 (Admin) · International Finance Trust Co v NSW Crime Commission [2009] HCA 49

3 · LEMBAGA PENGELOLA ASET

Pengelola aset terintegrasi dengan sistem peradilan

BELGIA · CONTOH PALING DEKAT

COIV sengaja dibentuk di dalam Kejaksaan, tanpa badan hukum sendiri, agar tidak lumpuh oleh gugatan. Tanggung jawab dipikul negara.

Risikonya nyata: Euroclear, pemegang aset Rusia yang dibekukan, digugat RUB 18,2 triliun di Moskow (2025).

DI NEGARA PEMBANDING

Prancis
Dipimpin magistrat (jaksa); di bawah Menteri Kehakiman dan Keuangan

Belanda
Jaksa mengelola barang sitaan; administrasi oleh Openbaar Ministerie

Amerika Serikat
Department of Justice, dipimpin Attorney General (Jaksa Agung)

Yang dibuat mandiri
Inggris: ARA dibubarkan 2008. Bulgaria: komisi khusus dikoreksi Pengadilan HAM Eropa (2021)

Usulan: satu rangkaian di Kejaksaan; bila ada badan, Kepala Badan ex officio Jaksa Agung, BPA pelaksana.

Sumber: UU Belgia 26 Maret 2003 (dekamer.be) · justice.gouv.fr (AGRASC) · om.nl · Todorov dkk. v. Bulgaria, ECtHR 13 Juli 2021

3 · BIAYA DAN AKUNTABILITAS

Lembaga mandiri: mahal dan tetap rawan

INGGRIS · ASSETS RECOVERY AGENCY

£65 jt

Dibentuk 2003 untuk membiayai diri dari hasil rampasan. NAO (2007): biaya £65 juta, aset dipulihkan hanya £23 juta. Dibubarkan 2008.

AUSTRALIA · NSW CRIME COMMISSION

±15%

Independen sejak 1986. Operation Winjana (2012): biaya hukumnya diambil dari dana yang dibekukan, ±15% anggaran setahun, tanpa dasar hukum.

PELAJARAN Biaya lembaga baru melampaui hasilnya, dan lembaga independen pun dapat menyalahgunakan kewenangan tanpa akuntabilitas yang jelas.

Sumber: NAO HC 253 (2007) · Police Integrity Commission Amendment Act 2008 (NSW) · PIC, Operation Winjana (2012)

3 · PERBANDINGAN · AMERIKA SERIKAT

Satu rangkaian di bawah Attorney General

DEPARTMENT OF JUSTICE · DIPIMPIN ATTORNEY GENERAL

1 · Penyidik

FBI, DEA, dan ATF menelusuri serta menyita aset.

2 · U.S. Attorney

Jaksa mengajukan perampasan pidana dan perdata ke pengadilan, sekaligus membela negara bila digugat.

3 · U.S. Marshals

Menyimpan, mengelola, dan menjual aset. TA 2025: 12.381 aset diselesaikan, US$475 juta untuk korban.

PENGAMAN PEMILIK · CAFRA 2000

- Beban pembuktian pada pemerintah
- Pembelaan pemilik beriktikad baik
- Gugatan wajib diajukan dalam 90 hari
- Ganti rugi aset rusak dan biaya pengacara

Sumber: 28 U.S.C. § 547 · DOJ, Types of Federal Forfeiture · USMS Asset Forfeiture (TA 2025) · CAFRA 2000 (Pub. L. 106-185)

4 · CONVICTION BASED DAN NON-CONVICTION BASED

Bedakan dua jalur; RUU ini komplementer KUHAP

NON-CONVICTION BASED · LINGKUP RUU INI

- **Sasaran:** aset (in rem), bukan orang
- **Dibuktikan:** kaitan aset dengan tindak pidana
- **Dasar:** tanpa putusan pemidanaan
- **Jalur:** permohonan JPN ke pengadilan negeri

CONVICTION BASED · SUDAH DIATUR KUHAP

- **Sasaran:** orang (in personam), yaitu pelaku
- **Syarat:** putusan pidana berkekuatan hukum tetap
- **Bentuk:** pidana tambahan perampasan, uang pengganti
- **Jalur:** perkara pidana; eksekusi oleh jaksa (KUHAP Ps. 342)

Australia Barat: bila kedua jalur dicampur

Seluruh harta “declared drug trafficker” dirampas tanpa melihat kausalitas aset dengan kejahatan. Rumah pasangan lansia 81 dan 77 tahun ikut dirampas, padahal pelakunya, anak mereka, hanya dipidana percobaan.

Usulan: RUU hanya mengatur jalur *non conviction based*; in *conviction based* tetap tunduk pada KUHAP (Ps. 7 dihapus).

Sumber: Criminal Property Confiscation Act 2000 (WA) · Skead, UWA Law Review (2016) · Draf RUU Ps. 3, 6, 7

4 · NCB BERPIJAK PADA PERKARA PIDANA

NCB pun harus berpijak pada perkara pidana

YANG ABUSIF

NCB tanpa perkara pidana

- Tidak ada tindak pidana yang disidik
- Aset disita hanya karena dicurigai
- Pemilik dipaksa membuktikan hartanya bersih

Hasilnya: perampasan berdasarkan kecurigaan

YANG KAMI USULKAN · TIGA SYARAT

1. Ada perkara pidana: tindak pidana asal telah disidik
2. Perkara terhenti karena alasan undang-undang: meninggal, buron, sakit permanen, atau aset ditemukan setelah putusan
3. Tindak pidana terbukti, setidaknya prima facie, dan hakim yakin aset berasal darinya

Standar Uni Eropa · Direktif 2024/1260 Pasal 15

Perampasan tanpa putusan hanya bila proses pidana telah dimulai, perkara itu sebenarnya dapat berujung pemidanaan, dan pengadilan yakin aset terkait dengan tindak pidana tersebut.

Sumber: Directive (EU) 2024/1260 Ps. 15 · UNCAC Ps. 54 ayat (1) huruf c · Draf RUU Ps. 6 ayat (1) dan Ps. 39 ayat (1)

USULAN KEJAKSAAN

Empat hal yang kami mohonkan

1 · HAK KEBENDAAN	Setiap blokir, sita, dan perampasan melalui jaksa dengan penetapan atau putusan pengadilan; pemilik berhak keberatan dan upaya hukum.
2 · NON-ARBITRARY	JPN menyaring perkara sejak awal melalui koordinasi dengan penyidik; pelaksanaan tidak dibiayai dari hasil rampasan.
3 · NON-LEMBAGA BARU	Tidak dibentuk badan yang berdiri sendiri; bila dipandang perlu, Kepala Badan ex officio Jaksa Agung.
4 · JALUR PERAMPASAN	RUU hanya mengatur jalur NCB untuk in rem, yang berindikasi karakteristik perkara pidana; in personam tetap tunduk pada KUHAP.

Rincian pasal: Lampiran 1–5 (titik rawan draf, pengaman, koordinasi Penyidik–JPN, Pasal 21–22D, pokok DIM)

Terima kasih

Sejalan dengan Konstitusi, terintegrasi dalam sistem peradilan, dan diakui praktik internasional.

